

ANALISIS PERAN KODIM 0618/BS KOTA BANDUNG DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA ALAM DI KOTA BANDUNG

THE ANALYSIS OF KODIM 0618/BS' ROLE IN THE EFFORT OF REDUCING NATURAL DISASTERS RISK IN BANDUNG CITY

Fithra Luthfi Bahri Zaqy¹, Suyono Thamrin², Lasmono³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan
(fithraluthfi@gmail.com, suyono.thamrin@gmail.com, lasmono63@yahoo.co.id)

Abstrak - Kodim 0618/BS Kota Bandung adalah satuan Komando Distrik Militer yang berada di bawah Komando Kodam III/Siliwangi yang membawahi sebanyak 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Dengan 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung, Kodim 0618/BS memiliki 347 personel dan berdiri sendiri karena tidak berada di bawah Korem dengan memiliki tugas untuk pemberdayaan wilayah, pertahanan dan menyiapkan semua aspek dalam pertahanan wilayah termasuk memiliki program dan penanganan sendiri dalam pengurangan resiko bencana alam. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui peran Kodim 0618/BS dalam pengurangan resiko bencana alam di Kota Bandung. Bandung termasuk daerah yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi karena berada di antara Sesar Lembang dan juga memiliki letak geografis berbentuk cekungan sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, dan menggunakan teknik deskriptif analisis, lokasi penelitian dilakukan di kota bandung dengan hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) peran Kodim 0618/BS cukup vital dalam pengurangan resiko bencana alam dibuktikan dengan posisi Dandim sebagai wakil ketua dalam susunan organisasi Satlak Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana, 2) Kota Bandung menggunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam sebagai Organisasi yang bertanggung Jawab dalam Penanggulangan Bencana Alam, dan 3) kurangnya tenaga ahli mitigasi bencana sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi personel.

Kata Kunci : Penanggulangan Bencana, Bencana alam, Tugas Pokok TNI

Abstract - Kodim 0618/BS Bandung City is a unit of the Military District Command which is under the Kodam III/Siliwangi Command which oversees as many as 14 Koramil that are spread in the area of Bandung City. With 14 Koramil spread across the city of Bandung, Kodim 0618/BS has 347 personnel and stands alone because it is not under the Military Command by having the task of regional empowerment, defense and preparing all aspects of regional defense including owning programs and handling themselves in risk reduction natural disasters. This research was conducted to find out the role of Kodim 0618/BS in Natural Disaster Risk Reduction in Bandung, where Bandung is a region that has a high potential for natural disasters because it is located between the Lembang Fault and

¹ Mahasiswa Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan.

² Ketua Lembaga Pendidikan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu, Universitas Pertahanan.

³ Ketua Lembaga Pendidikan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu, Universitas Pertahanan.

also has a geographical location in the form of a basin so that it has a high risk of flood. This study uses a qualitative method. Data obtained through observation, interviews and library studies. More data analysis techniques are carried out in conjunction with data collection when researchers are in the field, and using descriptive analysis techniques, the location of the study was conducted in Bandung with the results of research showing that 1) The role of Kodim 0618 / BS is vital in Natural Disaster Risk Reduction Dandim as deputy chairman in the Organizational Structure of the Executing Unit for Disaster Mitigation and Reduction and 2) Bandung City uses the Fire Department and Natural Disaster Management as an organization responsible for Natural Disaster Management 3) Lack of Disaster Mitigation Experts so that special training for personnel is needed.

Keywords: Disaster Management, Natural Disaster, Main Duty of TNI

Pendahuluan

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat.

Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah mekanisme pertahanan semesta yang mencakup pertahanan

militer dan nirmiliter, dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi seluruh aspek kehidupan dari setiap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional, sistem pertahanan negara yang dianut oleh NKRI adalah Sistem Pertahanan Semesta yang ditetapkan melalui UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang dinyatakan pada Bab I Pasal 1 ayat 2, dan diantaranya berbunyi segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, dengan fungsinya untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Dalam pelaksanaannya, konsep pertahanan negara terdapat 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi pertahanan militer yang di lakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tugas melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang, dan fungsi pertahanan nirmiliter yang mencakup

pemberdayaan seluruh sumber daya nasional yang meliputi kekuatan pertahanan selain militer.

Fungsi pertahanan yang disebut sebagai nirmiliter memiliki peranan dalam menghadapi ancaman terhadap negara ketika kondisi ancaman masih berupa konflik ataupun suatu hal yang menyebabkan kondisi ataupun sesuatu menjadi sebuah konflik salah satu yang berpotensi terjadinya konflik atau ketidakteraturan sosial adalah bencana alam yang bisa saja akan menimbulkan konflik intensitas rendah, dengan penanganan yang mengedepankan pendekatan fungsional. Kekuatan pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer⁴. Untuk pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil dikembangkan oleh masing-masing departemen/lembaga di luar pertahanan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Ancaman yang bersifat nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman-ancaman terhadap pertahanan nir-militer

⁴ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008* (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2008), hlm.45.

tidak berbentuk ancaman fisik secara langsung, sehingga tidak memungkinkan untuk ditangkal dengan menggunakan kekuatan militer/senjata. Ancaman nirmiliter terhadap sistem pertahanan negara adalah ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Salah satu ancaman yang diteliti dalam tulisan ini adalah ancaman berdimensi keselamatan umum yang berasal dari bencana alam yang terjadi di Indonesia yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Bencana alam termasuk kedalam dimensi ancaman non militer dikarenakan secara geografis Indonesia berada di dalam wilayah yang rawan bencana alam, disamping juga bencana alam yang terjadi akibat kesalahan dari manusianya sendiri.⁵

Definisi bencana, menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut menyebutkan bahwa

⁵ *Ibid.*

bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendeskripsikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Salah satu kota yang memiliki potensi bencana di Indonesia adalah Kota Bandung. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki julukan *Paris Van Java* ini memiliki potensi wisata alam yang cukup besar dan sangat menjanjikan, akan tetapi Kota Bandung juga menyimpan ancaman potensi bencana alam yang cukup tinggi dan beragam. Potensi yang ada berupa bencana alam gempa yang merupakan akibat dari adanya patahan Lembang sampai dengan adanya bencana alam banjir disertai tanah longsor.

Berdasarkan data bencana yang terjadi di Kota Bandung antara Periode Januari s.d. Desember 2017 Kota Bandung mengalami beberapa bencana alam dan bencana alam yang kerap terjadi di Kota Bandung, yaitu banjir dan tanah longsor. Dengan jumlah kejadian bencana banjir sebanyak enam kali dan tanah longsor sebanyak lima kali apabila dihadapkan dengan keadaan demografi penduduk di wilayah Kota Bandung yang merupakan berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan mencapai 73,5% menjadikan Kota Bandung Rawan terhadap bencana alam. Dengan jumlah kejadian bencana banjir sebanyak enam kali dan tanah longsor sebanyak lima kali menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana alam di wilayah Kota Bandung. Hal Ini menyebabkan Pihak pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemadam Kebakaran memberikan perhatian ekstra terhadap potensi bencana alam tersebut.

Di samping kedua bencana alam yang familiar dengan masyarakat Bandung tersebut, terdapat suatu potensi bencana alam yang membayangi Kota Bandung, yaitu adanya bencana alam gempa bumi. Hal tersebut terjadi karena secara geologis Kota Bandung berada pada cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling

melingkup, yaitu sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur dan sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi

Jika dilihat dari kejadian bencana yang terjadi di Kota Bandung dalam 10 tahun terakhir terdapat 27 kejadian bencana, dengan kejadian bencana paling banyak adalah bencana banjir yaitu terjadi sebanyak 14 kali, bencana banjir juga memiliki efek merusak yang cukup besar selain gempa yang terjadi sekali sebagai reaksi aktifitas sesar lembang, menurut pengamatan geodetik membuktikan bahwa sesar Lembang adalah sesar aktif, pergerakannya didominasi mekanisme sesar geser mengiri dengan kecepatan 3 mm/tahun.⁶ Pengamatan kegempaan dengan menggunakan jaringan stasiun pengamatan gempa milik BMKG yang berada di sekitar Lembang juga menunjukkan aktivitas kegempaan yang membuktikan bahwa Lembang merupakan sesar aktif, pernah bergerak dalam 10.000 tahun terakhir⁷, dan sebagian besar Kota Bandung

diperkirakan akan mengalami percepatan puncak sekitar 0.21 – 0.25 g atau setara dengan MMI VI-VII. Bangunan dengan desain dan konstruksi yang sangat baik diperkirakan tidak akan mengalami kerusakan yang berarti, sementara bangunan dengan konstruksi standar diperkirakan dapat mengalami kerusakan ringan hingga tingkat kerusakan sedang, namun bangunan dengan konstruksi yang buruk dapat mengalami kerusakan berat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Potensi bencana yang ada di Kota Bandung akan sangat terasa membahayakan apabila dihadapkan dengan Keadaan Penduduk di wilayah Kota Bandung yang merupakan berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan mencapai 73,5% merupakan kawasan terbangun beresiko tinggi pada berbagai bencana. Sesuai dengan data potensi bencana yang ada di Kota Bandung maka beberapa wilayah yang rawan untuk terkena dampak bencana alam adalah sebagai berikut : 1. Kawasan yang sering terjadi banjir, terutama daerah - daerah yang di Lewati oleh 5 aliran sungai yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan dan Cipadung; 2. Daerah Rawan Gempa Bumi : Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari, dan Sumur Bandung; 3. Daerah Rawan Longsor : Cibiru,

⁶ Irwan Meilano, et.al, "Slip Rate Estimation of the Lembang Fault West Java from Geodetic Observation", *Journal of Disaster Research*, Vol.7 No.1, 2012, hlm. 12-18.

⁷ Edward A. Keller & Nicholas Pinter, *Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape*, (New Jersey: Prentice Hall, 1996).

Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.

Apabila mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait Pengurangan Resiko Bencana yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengurangan Resiko Bencana, maka pemerintah daerah dalam upaya pengurangan Bencana alam yang terjadi di wilayah dilaksanakan dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tersebut.

Akan tetapi kondisi yang terjadi pada saat ini di Kota Bandung menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung lebih cenderung untuk memilih Menggabungkan Instansi Pengurangan Resiko bencana alam dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung.

Di sisi lain dalam kaitannya dengan tugas pokok untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan Tumpah darah Indonesia, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0618/BS yang bertugas di wilayah Kota Bandung berkewajiban untuk menjamin keselamatan rakyat Bandung dengan turut serta dalam upaya untuk Dalam suatu sistem Pengurangan Resiko bencana Alam di Kota Bandung. Kodim 0618/BS merupakan Kodim yang mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar

kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam III/Slw. Kodim 0618/BS terletak di Jalan Bangka no. 2 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung degan 14 Koramil yang tergelar di seluruh wilayah Kota Bandung.

Dari latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi di Kota Bandung dan nanti nya akan menjadi kajian solusi dari permasalahan tersebut sehingga dibuatlah sebuah rencana penelitian dengan judul yaitu, “Bagaimana Peran Kodim 0618/BS Kota Bandung Dalam Pengurangan Resiko bencana Alam di Kota Bandung?” Oleh karena itu diperlukannya suatu kegiatan yang komprehensif dan sistematis dengan mengoptimalkan peran kodim dalam rangka Dalam suatu Pengurangan Resiko bencana alam di Kota Bandung dalam upayanya untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa identifikasi masalah antara lain meliputi bagaimana peran dan partisipasi Kodim 0618/BS dalam upaya Pengurangan Resiko bencana alam di Kota Bandung, dan bagaimana Hambatan dan Strategi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Peran kodim 0618/BS Kota

Bandung dalam Pengurangan Resiko bencana alam di Kota Bandung.

Tinjauan pustaka

Teori Peran

Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan Teori Peran. Teori Peran adalah sebuah perspektif dalam kajian ilmu sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam beberapa kategori sosial dan kewenangan tertentu. Menurut teori ini, pada dasarnya dalam setiap pergaulan sosial dan interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia sudah tercipta sebuah skenario yang disusun oleh sistem di dalam masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya masing-masing.

Soerjono Soekanto menjelaskan⁸ bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan status yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai dengan kedudukannya,

⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).

maka ia menjalankan suatu fungsi. Dalam konteks ini jika dikorelasikan dengan Hak dan Kewajiban Kodim Khusus nya TNI secara Umum yaitu kewajiban untuk Membela Negara dengan melindungi keselamatan segenap bangsa yang di dalam nya terdapat masyarakat dan rakyat. TNI juga memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan menjaga dari beragam Ancaman yang dihadapi dan diantara beragam ancaman yang akan muncul untuk menggoyahkan keamanan dan keselamatan bangsa salah satunya adalah ancaman yang bersifat nyata dan bisa muncul kapan saja diantara nya terdapat bencana Alam. Hal inilah yang membuat status dan peran TNI di masyarakat menjadi sangat penting dan vital dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, disini salah satunya TNI berperan dalam mengurangi resiko serta menanggulangi dari ancaman bencana alam.

Menurut David Berry⁹ mengemukakan bahwa peranan merupakan seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial. Peranan memiliki makna yang saling berkaitan dengan kedudukan. Dari pengertian kedudukan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan

⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

merupakan tempat seseorang dalam suatu institusi atau kelompok

Hakekat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu. Dimana kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dilaksanakan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah. Semuanya mempunyai peran yang sama dimana peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Dari beberapa pengertian diatas maka Peneliti mempunyai kesimpulan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Sehingga untuk merealisasikan sinergitas Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dengan pemerintah daerah dalam Pengurangan Resiko bencana alam diperlukan pengetahuan dan peran masing-masing institusi dihadapkan dengan tugas dilapangan. Sehingga apabila peran tersebut dapat dipahami maka kondisi kebersamaan dan sinergitas yang baik akan bisa diterapkan tanpa munculnya sifat ego sektoral.

Teori Manajemen Resiko

Menurut Herman Darmawi Manajemen Risiko merupakan¹⁰ suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sehingga teori ini bisa digunakan dalam perwujudan sistem manajemen Pengurangan Resiko bencana alam. Terlebih daripada hal tersebut, dalam bukunya Herman menyampaikan bahwa, Pengendalian resiko dijalankan dengan metode berikut:

1. Menghindari Resiko
2. Mengendalikan Kerugian
3. Pemisahan
4. Kombinasi atau *Pooling*
5. Pemindahan resiko

Penjelasan yang sudah dijabarkan diatas juga selaras dengan pernyataan Manajemen resiko menurut Djohanputro¹¹ manajemen resiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan resiko. Sehingga segala tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam sebuah

¹⁰ Hermawan Darmawi, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.17.

¹¹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat*, (Jakarta: PPM, 2008), hlm.43.

fenomena dapat diminimalisir. Karena di dalam manajemen resiko memiliki landasan preventif.

Dari pengertian manajemen resiko yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, bahwa manajemen resiko merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga yang merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan juga mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan Lembaga dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam setiap tindakan. Implementasi kebijakan merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda antara implementasi dan kebijakan.

Teori Manajemen Bencana

Menurut Susanto, manajemen bencana merupakan¹² strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana. Tujuannya adalah untuk mencegah, memprediksi dan mengantisipasi bencana sebatas kemampuan yang dimiliki serta meminimalkan kerugian. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Proses manajemen bencana melibatkan empat tahapan,

¹² A.B. Susanto, *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana: Sebuah Pendekatan Strategic Management*, (Jakarta: The Jakarta Consultion Group & Eka Tjipta Foundation, 2006), hlm.8.

yaitu mitigasi, kewaspadaan, tanggap dan pemulihan. Jadi manajemen bencana bukan hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Manajemen bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana.

Berkaitan dengan bencana dan macam-macam bencana serta gejala bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran atau siklus atau bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya secara umum antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana.

Maka dengan merujuk dari pernyataan dan teori yang sudah dijelaskan di atas maka peran TNI AD khususnya Kodim 0618/BS dalam suatu sistem manajemen bencana sangatlah vital, mengingat satu-satunya organisasi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di daerah adalah Kodim yang selalu terdapat dan bersinergi dengan

masyarakat maupun lembaga penanggulangan bencana alam.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subyek pelaku antara lain perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹³. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif menurut John W. Creswell ada lima, yaitu: Naratif, Fenomenologi, *Grounded Theory*, Etnografis dan Studi Kasus. Subyek penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing. Para Informan tersebut adalah:

- a) Pemerintah Kota Bandung: Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung.
- b) Kodim 0618/BS : Dandim 0618/BS dan staf Kodim.
- c) Dinas Pemadam Kebakaran & Penanggulangan Bencana Alam Kota Bandung: Kepala Bidang

Penanggulangan Bencana Alam & Staff Dinas Damkar.

- d) Tokoh Masyarakat dan Ormas Kota Bandung.

Objek penelitian adalah Protap Manajemen Bencana Kota Bandung, Protap Manajemen Bencana Alam Kodim 0618/BS SOP Bencana Alam dinas Damkar, dan Peran Kodim Menjaga Sinergitas dengan beberapa Instansi juga peran Kodim dalam manajemen bencana di Kota Bandung.

Analisa Data dan Pembahasan Peran Kodim dalam pengurangan Resiko Bencana alam di Kota Bandung

Keterlibatan dan peran Kodim dalam mengatasi dampak bencana alam selama ini adalah sebagai bentuk keterpanggilan dan rasa peduli untuk ikut serta mengurangi beban masyarakat yang sedang mengalami musibah. Karena sesuai Undang-undang yang berlaku, tugas pokok dari TNI AD sesuai Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan nusa bangsa dan negara.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

Dalam pasal 7 ayat (2), memuat salah satu bentuk tugas dari Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan oleh TNI adalah untuk “membantu menanggulangi akibat dari bencana alam yang terjadi, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Sedang dalam Pasal 8, salah satu tugas Angkatan Darat adalah “melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat” atau yang dikenal dengan pembinaan teritorial.

Dalam membina kemampuan pertahanan aspek darat dan untuk menjalankan amanat Undang-undang yakni membantu menanggulangi Efek serta akibat dari bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan sesuai yang disebutkan di atas, maka TNI AD melakukan dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui Binter yang dilaksanakan dalam bentuk operasi ataupun pembinaan. Keberhasilan TNI AD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh efektifitas dari pelaksanaan pembinaan melalui perencanaan pembinaan fungsi utama TNI AD yang didukung oleh pembinaan fungsi lainnya secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dengan dasar tujuan membantu pemerintah Kota Bandung dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik dan kemanunggalan TNI-rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang,

alat juang dan kondisi juang yang tangguh

Tugas pokok Kodim sebagai badan pelaksana Korem yang bersifat kewilayahan menyelenggarakan Binter secara terus menerus untuk mewujudkan sasaran Binter guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial, dan komando kewilayahan berfungsi membina aspek geografi, demografi dan kondisi sosial dimana bencana merupakan tantangan yang harus dihadapi, penanggulangan bencana tidak mungkin hanya melibatkan unsur dari militer dan pemerintah saja namun perlu keterpaduan semua pihak dalam rangka memberikan rasa aman dan meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat, dengan demikian aparat kewilayahan memiliki peran penting sebelum, selama dan sesudah bencana itu terjadi

Penggunaan kekuatan TNI-AD khususnya dalam ruang lingkup Kodim dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan yang bertujuan mencegah dari berkembangnya kerugian yang lebih banyak lagi, baik kerugian dan kehilangan jiwa maupun harta benda milik rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial

dan dukungan. Beberapa kasus bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia yang merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah maupun keterlibatan TNI- khususnya TNI-AD sesuai peran, fungsi, dan tugas baik tugas bantuan pada pemerintah maupun tugas dalam membantu kesulitan rakyat diantaranya tugas membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.

Saat ini organisasi yang dibentuk pemerintah dalam misi penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Isi dalam Undang-undang tersebut, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga non kementerian setingkat kementerian, yang terorganisir secara terpusat dan bertempat di daerah-daerah di seluruh Indonesia namun di dalam Undang-undang No. 24/2007 belum memuat secara detail tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab TNI dalam penanggulangan bencana alam.

Selama ini, kegiatan pada saat bencana dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kewenangan dari elemen BNPB dan BNPB diantaranya berupa; pertama, kajian secara cepat dan

tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya yang menjadi lokasi terjadinya bencana; kedua, penentuan status wilayah keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban di lokasi terjadinya dan pusat dari bencana; ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap masyarakat dan kelompok rentan sebagai akibat dari bencana yang terjadi , juga pengerahan sumber daya manusia (SDM), yang terampil, terlatih dan cepat tanggap juga peralatan dan logistik (pengadaan barang/ jasa); dan keempat, pemulihan secara cepat prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur. Posisi dari TNI AD dalam tahap darurat bencana alam masih sebatas ada jika diperlukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jadi Sinergitas dan Kepekaan sosial dalam memandang dan perspektif bencana yang terjadi harus berkesinambungan antara pihak TNI AD, BNPB, pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pun menemukan bahwa bukan hanya peran TNI yang vital dalam keadaan saat bencana saja tetapi dalam tahap pasca bencana, TNI AD memiliki peran yang sangat vital dalam rehabilitasi (mental dan psikologis) sebagai akibat dan salah satu resiko pasca bencana juga rekonstruksi korban bencana maupun wilayah yang berdampak bencana. Dalam kegiatan ini, posisi TNI AD juga

masih sebatas ada jika diperlukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kegiatan rehabilitasi merupakan upaya agar keadaan dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya, bukan hanya keadaan secara fisik tetapi mental masyarakat pun dalam konteks rehabilitasi di atas diharapkan kembali seperti semula. Sedangkan kegiatan rekonstruksi adalah upaya untuk membangun kembali kondisi atau wilayah dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan semula (bukan hanya memperbaiki ke keadaan semula tetapi diharapkan lebih baik dari keadaan semula). Kegiatan tersebut meliputi: perbaikan lingkungan daerah bencana,, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik (konflik sebagai efek bencana yang biasanya terjadi di daerah yang memang rawan konflik).

Kodim 0618/BS Kota Bandung memiliki protap (prosedur tetap) dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana alam di kota Bandung sebagai langkah preventif, diantara bencana yang masuk kategori prosedur tetap penanggulangan bencana yang dirancang oleh Kodim 0618/BS Kota Bandung adalah beberapa bencana yang kemungkinan sering terjadi dan diklasifikasikan sebagai bencana yang

terjadi karena faktor manusia (kelalaian manusia) ataupun murni bencana yang disebabkan faktor alam pengklasifikasian bencana ini dilakukan untuk dapat melakukan tindakan yang tepat dalam upaya pengurangan resiko bencana alam di Kota Bandung, dan jenis bencana alam tersebut yaitu, kebakaran, gunung meletus/gempa bumi, banjir, longsor dan juga kemarau berkepanjangan.

Dalam membina kemampuan pertahanan aspek darat dan untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yakni membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, maka TNI AD melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui Binter yang dilaksanakan dalam bentuk operasi ataupun pembinaan. Keberhasilan TNI AD dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh efektifitas pelaksanaan pembinaan melalui pembinaan fungsi utama TNI AD didukung oleh pembinaan fungsi lainnya secara terencana, terpadu serta berkelanjutan. Adapun kebijakan dan strategi pembinaannya salah satunya adalah pembinaan territorial, sebagaimana Peran TNI tersebut, Groos, Mason, dan McEachern¹⁴ mendefinisikan “peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada

¹⁴ Gross N., W.S. Mason, dan A.W. McEachern. “Explorations in Role Analysis”, dalam Wirutomo, Paulus (Ed.), *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry*. (Jakarta: Rajawali Pers., 1982).

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Konsep profesionalisme yang menjadi pedoman TNI terutama Kodim dalam pengurangan resiko bencana di daerah ke depan bukan hanya dengan “pengabdian” dan juga Panggilan terhadap kemanusiaan namun tanpa adanya dukungan administrasi yang cukup dari Pemda ketika melaksanakan *civic mission* dalam rangka mitigasi dan pengurangan bencana seperti yang sering dilaksanakan selama ini, namun yang diharapkan adalah konsep “profesional” dalam arti yang sesungguhnya dalam artian peran dan beban tugas yang diemban TNI terutama Kodim selama proses pelaksanaan pengurangan resiko bencana mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana setimpal dengan perhatian dan dukungan anggaran yang diberikan Pemda melalui BPBD selain itu tingkat kemampuan (kualitas) anggota akan berpengaruh dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Peran kodim 0618/BS Kota Bandung dalam Pengurangan Resiko bencana alam di kota Bandung

Walaupun dilihat dari sudut pandang koordinasi tidak terlalu banyak kendala tetapi dari sisi teknis koordinasi

terkendala beberapa permasalahan dan adapun salah satu kendala utama yang dihadapi pada saat koordinasi dengan Pemerintahan Daerah maupun pihak dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

1. Pertama, jarak dan wilayah menuju lokasi yang cukup sulit. Hal ini merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan koordinasi, Konteks sulit disini adalah ruang lingkup dan tata Kota Bandung yang cukup padat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga memiliki efek saat terjadinya sebuah bencana pihak terkait kesulitan menggapai lokasi bencana dengan cepat. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BNPB dan/atau BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana tetapi di lapangan terkadang memiliki kondisi yang bereda dan salah satu kendala yang dihadapi di perkotaan khususnya kota besar seperti Bandung adalah kemacetan dan tingkat rasa ingin tahu masyarakat terhadap bencana yang cukup tinggi sehingga membuat konsentrasi massa (masyarakat) terbagi menjadi dua arah, yang pertama, masyarakat yang berkumpul

mendekati lokasi bencana dan yang kedua masyarakat yang menjauhi titik bencana sehingga membuat mobilitas Tim Reaksi Cepat sedikit terhambat, lokasi dari dinas pemadam kebakaran sendiri berada di tengah Kota dan termasuk wilayah dengan kemacetan cukup tinggi dan kepadatan kendaraan cukup tinggi pada jam kerja

2. Kedua, penanganan bencana masih dianggap menjadi urusan pemerintah dan paradigma penanganan masih berorientasi pada tanggap darurat jadi maksud pernyataan di atas dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi bencana masyarakat khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki eksklusivitas dan individualitas yang masih cukup tinggi permasalahan penanganan bencana alam masih menganggap bahwa penanganan bencana dianggap menjadi urusan pemerintah bukan menjadi urusan bersama, dan paradigam masyarakat masih menganggap bahwa penanganan masih berorientasi pada tanggap darurat tanggap definisi dari darurat bencana disini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Ketiga, minimnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada saat penanganan tanggap darurat dan terkadang bencana yang muncul sulit untuk di jangkau dan di tangani dengan sarana dan prasarana yang dimiliki ditambah dengan keterampilan masyarakat terhadap penanganan dan penanggulangan bencana yang masih minim.

Jika dianalisis dengan menggunakan sudut pandang sosiologi fenomena yang terjadi dari pengungkapan hasil penelitian yang sudah di deskripsikan tersebut sesuai dengan Teori Peran yang digunakan oleh Peneliti. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain¹⁵

¹⁵ Talcott Parsons, *The Social System*, (London: Routledge, 1951).

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan, pertentangan harapan inilah yang dasarnya akan menjadi kendala dalam memaksimalkan peran-peran yang sudah diberikan hak dan kewajiban¹⁶ dalam hal ini pihak pemerintah kota Bandung, pihak Kodim dan Dinas Damkar sudah menjalankan Peran dan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah dibuat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Peran Kodim 0618/BS Kota Bandung Mewujudkan Pengurangan resiko Bencana alam dan di kota Bandung

Salah satu strategi yang bisa digunakan dalam penanganan bencana terlebih konteks bencana bisa berarti bencana

yang disebabkan manusia dan bencana yang murni muncul akibat reaksi alam tidak selayaknya/cukup mengandalkan kemampuan pemerintah maupun instansi terkait. Pemerintah memiliki keterbatasan baik dalam sumber daya manusia, pendanaan, perlengkapan maupun logistik. Disinilah Peran Kodim dalam keterlibatan TNI dalam perbantuan bencana alam tersurat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa TNI sebagai pengarah, sedangkan dalam peraturan No 1 Kepala BNPB tahun 2008, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat menunjuk salah satu eselon tertinggi sebagai Komandan posko tanggap darurat, dan biasanya menunjuk Sekda Kabupaten.

Strategi revitalisasi dan penerapan Manajemen bencana harus bersifat kesemestaan, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketiga komponen tersebut harus mampu menjadi pelaku yang setara, semua harus berperan utama, bukan hanya berperan serta. Sasaran implementasinya adalah masyarakat mengetahui ancaman bahaya di lingkungan masing-masing dan masyarakat harus mampu menolong dirinya sendiri dan memiliki keterampilan untuk mensiasati dan survive, saat bencana alam terjadi.

¹⁶ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York: Free Press, 1949).

Konsep dasar manajemen bencana berbasis masyarakat seperti yang sudah disebutkan diatas adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat atau mengurangi kerentanan masyarakat terhadap efek dari bencana. Besaran bencana merupakan akumulasi berbagai ancaman bahaya dengan rangkaian kerentanan yang ada di masyarakat. Rangkaian kerentanan ini antara lain terdiri dari kemiskinan, kurangnya kewaspadaan, kondisi alam yang sensitif, ketidak-berdayaan dan berbagai tekanan dinamis lainnya.

Kerentanan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain berbeda akar masalahnya, demikian pula ancaman bahayanya pun berbeda-beda jenisnya karena pada umumnya permasalahan bencana di Indonesia menjadi rumit karena terjadi di daerah yang kondisi masyarakatnya tidak mampu alias rentan dan lokasinya pun jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dicapai. Oleh sebab itu, paradigma baru manajemen bencana harus dapat mengatasi permasalahan tersebut, dengan manajemen bencana berbasis masyarakat, yaitu menuju masyarakat yang mampu mandiri, mampu mengenali ancaman bahaya di lingkungannya dan mampu menolong dirinya sendiri, juga dengan memaksimalkan prosedur tetap penanggulangan bencana yang sudah tersusun dapat sesuai prosedur dengan

tidak melupakan teori manajemen bencana dan mitigasi bencana.

Binter sebagai fungsi utama Kodim. Sesuai dengan penjelasan pada Doktrin dan pengertian Kartika Eka Paksi pada tahun 2017 yang mendeskripsikan dan menjelaskan bahwa peran TNI AD adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang didalam menjalankan fungsi dan tugasnya didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik Negara, dengan penjabaran melalui visi yaitu TNI AD yang profesional dan dicintai rakyat. Juga Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan tugas-tugasnya TNI AD menyadari sepenuhnya kekuatan hubungan antara TNI AD dengan rakyat, sehingga menempatkan program Pembinaan territorial sebagai fungsi utamanya, selain dari fungsi pertempuran dan fungsi pembinaan postur.

Terkait dengan hal tersebut dijabarkan melalui program kerja Kodim 0618/BS Kota Bandung dalam tugas-tugasnya, yang salah satu aplikasinya adalah pada pelibatan peran Kodim 0618/BS Kota Bandung dalam penanggulangan beberapa bencana di wilayah kerjanya dan pelibatan dan kerja nyata Kodim 0618/BS Kota Bandung sudah tercatat pada Protap Penanggulangan Bencana yang sudah terintegrasi dengan Pemerintah daerah, Dinas Pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dan juga BNPB Provinsi Jawa Barat.

Sikap pelaksana terutama implementor secara umum sudah mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan dan mempunyai komitmen untuk menjalankan tugasnya yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, hal ini ditandai dengan adanya respon yang cukup bagus dari masyarakat secara umum.

Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan penjelasan yang sudah di deskripsikan dan dianalisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Kodim dalam ikut serta membantu masyarakat dalam pengurangan resiko bencana alam sangatlah vital dan signifikan, khususnya di Kota Bandung dimana Lembaga penanggulangan bencana disinergikan ke Dinas Pemadam Kebakaran tetapi tetap tidak Mengurangi peran dari BPBD yang tetap tertuang dalam SOP dan Protap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam. Pihak Kodim sendiri memiliki Prosedur tetap (Protap) Penanggulangan Bencana yang melingkupi bencana yang disebabkan oleh manusia dan Alam yang diantaranya Kebakaran, Gempa dan Gunung Meletus, juga Banjir dan Tanah longsor, Langkah ini dilakukan semata-mata karena keikutsertaan TNI dalam penanggulangan bencana tersurat dalam UU No 34 Tahun 2007 tentang TNI dan UU No 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, Secara garis besar dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberhasilan tugas pokok TNI AD bidang teritorial, yaitu sejauh mana Kodim dapat bersinergi dengan pihak-pihak terkait (pemerintah Kota Bandung, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, LSM, Komunitas dan Warga Kota Bandung) membuat tindakan Preventif dalam mengatasi Potensi bencana alam, dengan menganalisis potensi bencana alam yang paling sering terjadi di Kota Bandung, disini Peran strategis tersebut telah dilaksanakan oleh Kodim 0618/BS Kota Bandung dengan melaksanakan peran pembinaan komunikasi sosial yang difungsikan untuk membekali dan menambah kemampuan komunikasi dan manajemen teritorial prajurit dalam Manajemen Penanggulangan Bencana alam
- b. Pelaksanaan peran pembinaan komunikasi sosial dan pra kondisi dilihat saat Peneliti melaksanakan Penelitian di lingkup wilayah Kodim 0618/BS dan lingkup Pemerintahan Kota Bandung dapat terlaksana akan tetapi masih menemui beberapa kendala dan keterbatasan, antara lain Kualitas Kodim yang perlu ditingkatkan, meliputi perkuatan Satgas penanggulangan Bencana alam, sosialisasi pembinaan

komunikasi sosial dan latihan komsos belum menyeluruh, personel belum sepenuhnya Pahami perihal Penanggulangan Bencana alam dan Prosedurnya, dukungan materil; Sistem Komando dan Pengendalian yang masih mengalami persoalan di lapangan yang masih terbatas, yakni keterbatasan sarana dan prasarana terutama kendaraan dan serta anggaran untuk mendukung komsos Babinsa, tenaga pembina komsos masih terbatas, dan belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan komunikasi sosial dan Manajemen penanggulangan bencana alam. selain hal tersebut status kota Bandung Yang tidak memiliki BPBD tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dikarenakan kewenangan BPBD kota Bandung dipanjangtanggankan kepada Dinas pemadam Kebakaran dan di Kota Bandung juga terdapat Markas BNPB Provinsi. Koordinasi dari beberapa pihak terkait yang memiliki wewenang dalam Penanggulangan Bencana alam di Kota Bandung berjalan Cukup baik dengan melakukan Koordinasi yang Intens Proses tindakan Preventif pun cenderung tidak ada kendala yang berarti di lapangan.

Saran

Untuk memaksimalkan peran Kodim 0618/BS dalam rangka pengurangan resiko Bencana alam dapat berupa tindakan Preventif sebelum terjadinya bencana alam. Maka saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Saran Teoritis

Perlu adanya pendidikan teritorial secara terpusat yang dimaksudkan untuk khusus diadakan terhadap aparat Satkowil yang berdinasi di daerah-daerah rawan terjadinya bencana alam dan memiliki Potensi bencana alam. Materi yang diberikan berupa pendidikan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana alam ataupun seputar tindakan Preventif dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam menghadapi bencana yang bisa saja muncul tiba-tiba, juga pemberian pendidikan khusus untuk anggota agar mengetahui prosedur lebih dalam menghadapi unsur-unsur bencana dan bagaimana membentuk komunikasi sosial dengan pihak terkait sehingga diharapkan sinergi yang sudah terbentuk bisa berjalan maksimal yang efeknya sustainable atau berkelanjutan di masa yang akan datang.

b. Saran Praktis

Mengintensifkan peran babinsa di wilayah sebagai penyambung maupun

pelopor masyarakat di wilayahnya, Mengintensifkan peran Babinsa Perlu ditambah dengan pemberian dan pembentukan Buku pedoman Pengurangan Resiko bencana Alam sehingga Unit TNI angkatan darat di semua unsur dapat memiliki pengetahuan dalam pengurangan resiko bencana alam, Khususnya di wilayah kota Bandung, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dengan waktu yang relatif cepat apabila Pemerintah Kota Bandung dapat bekerja sama dengan Kodim 0618/BS untuk menggunakan peran Babinsa di wilayah untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana terkait perwujudan Pengurangan resiko Bencana Alam. Hal ini dinilai memiliki hasil yang optimal dikarenakan Babinsa merupakan ujung tombak dari Kodim dalam melaksanakan fungsi Pembinaan wilayah sehari-hari. Sehingga Babinsa dapat langsung memberikan arahan, memberikan contoh sekaligus bersama sama masyarakat dalam mewujudkan Pengurangan resiko bencana alam di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Berry, David. 1983. *Pokok-pokok pikiran dalam Sosiologi* (diterjemahkan oleh Tim Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosiologi (LPPS)). Jakarta: C.V. Rajawali.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2012. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Author.

Keller, Edward A., Nicholas Pinter. 1996. *Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape*. New Jersey: Prentice Hall.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Darmawi, Hermawan. 2016. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Djohanputro, Bramantyo. 2008. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.

Merton, Robert K.. 1949. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

Moleong, Lexy J.. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. London: Routledge.

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susanto, A.B.. 2006. *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana: Sebuah Pendekatan Strategic Management*. Jakarta: The Jakarta Consultion Group & Eka Tjipta Foundation.

Jurnal

Meilano, Iwan, et.al. 2012. "Slip Rate Estimation of the Lembang Fault West Java from Geodetic Observation". *Journal of Disaster Research*. Vol.7 No.1.